



2024

# LAPORAN KINERJA

KPP Pratama Pangkalanbun





## KATA PENGANTAR

Dengan berakhirnya tahun anggaran 2024, KPP Pratama Pangkalanbun melakukan serangkaian evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di tahun 2024. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kinerja institusi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Evaluasi ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas menuju *good governance*. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja serta Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Untuk mewujudkan *good governance* perlu penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme.

Seiring dengan telah dilaksanakannya program Reformasi Birokrasi di Kementerian Keuangan Republik Indonesia, KPP Pratama Pangkalanbun sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* menyusun pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas pemerintahan di sektor perpajakan dalam bentuk Laporan Kinerja (LAKIN).

LAKIN memuat visi, misi, strategi dan acuan. Merupakan pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsi KPP, sehingga dapat merespon perkembangan saat ini maupun yang akan datang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akhirnya, dengan tersusunnya LAKIN Tahun 2024 ini, semoga bisa menjadi bahan evaluasi dan motivasi bagi seluruh pegawai, sehingga mampu menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak Tahun 2025 dengan dilandasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan: Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan.

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja, KPP Pratama Pangkalanbun telah menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) yang merupakan gambaran tentang capaian kinerja di tahun 2023 dengan mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU). LAKIN mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja dalam mencapai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kinerja yang disepakati tidak hanya dibatasi pada kinerja kegiatan di tahun yang bersangkutan, tetapi kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, target kinerja mencakup *outcome* yang dihasilkan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Pada tahun 2024 realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Pangkalanbun sebesar Rp2.472.285.176.968 atau 100.13% dari rencana yang telah ditetapkan Rp2.468.990.713.000. Kinerja penerimaan pajak yang sangat baik tak lepas dari tren peningkatan harga komoditas serta membaiknya perekonomian domestik dan global.

Dengan tersusunnya LAKIN KPP Pratama Pangkalanbun Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pencapaian IKU di tahun-tahun mendatang serta dalam rangka menerangkan *good governance* untuk instansi pemerintah. Laporan Kinerja juga menggambarkan apa, bagaimana, keberhasilan ataupun kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai rencana kinerja tahun 2024. Kami sangat berharap dengan tersusunnya LAKIN ini dapat memberikan pedoman bagi unit kerja ataupun unit lainnya untuk mencapai target rencana kinerja tahun 2025 dan berusaha memperbaiki apa yang belum tercapai di tahun 2024.

Kotawaringin Barat, 30 Januari 2025  
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik  
Teguh Setyobudi Suwondo



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi	2
A. Struktur Organisasi	3
D. Wewenang dan Tanggung Jawab	5
E. Sistematika Pelaporan	5
BAB II	6
PERENCANAAN KINERJA	6
A. Rencana Strategis	6
B. Penetapan Kinerja Tahun 2024	8
BAB III	11
AKUNTABILITAS KINERJA	11
A. Capaian Kinerja Organisasi	11
B. Realisasi Anggaran	29
C. Penghargaan	29
BAB IV	30
PENUTUP	30
LAMPIRAN I	33

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	9
Tabel 1. 2 Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024	11
Tabel 1. 4 Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dibandingkan Dengan Dua Tahun Sebelumnya	13
Tabel 1. 5 Realisasi Kinerja Tahun 2024 Disandingkan Dengan Target Jangka Menengah DJP	14
Tabel 1. 6 Realisasi Kinerja Tahun 2024 Disandingkan Dengan Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024	16
Tabel 1. 7 Efisiensi Penggunaan Sumber daya untuk Tahun Anggaran 2024	21
Tabel 1. 8 PAGU dibanding dengan Realisasi Penyerapan Anggaran	22
Tabel 1. 9 Mitigasi Risiko Tahun 2024	23
Tabel 1. 10 Rencana Aksi Mitigasi Risiko Tahun 2025	27



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangakalanbun adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah. Dalam rangka memenuhi sasaran atau target yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangakalanbun tentu telah melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang merupakan kebijakan strategis dari DJP yang tercantum dalam Rencana Strategis DJP.

Sedangkan untuk sasaran dan program-program utama tahunan dituangkan dalam rencana kinerja tahunan yang setiap akhir tahunnya dilakukan evaluasi dan analisis mengenai tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam rangka mencapai visi dan misi yang ditetapkan. Keberhasilan maupun kegagalan ini tentunya sangat berpengaruh terhadap kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangakalanbun untuk masa yang akan datang.

Laporan Kinerja disusun sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja serta Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

LAKIN berperan sebagai kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif dan kualitatif sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dalam rangka mewujudkan *good governance* serta sebagai *feedback* untuk meningkatkan kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangakalanbun secara bertahap dan berkesinambungan.

## B. Tugas dan Fungsi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkajene mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkajene adalah sebagai berikut:

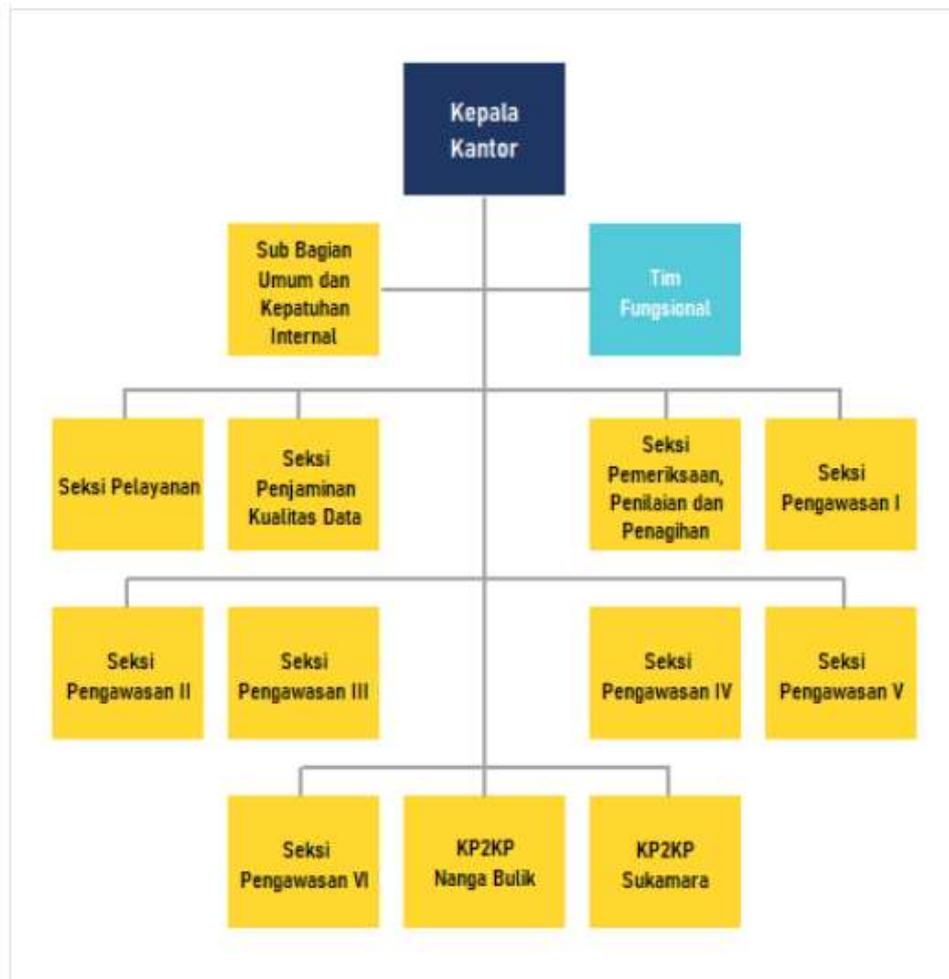
- a. pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
- c. pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
- d. penyuluhan perpajakan;
- e. pelaksanaan registrasi Wajib Pajak;
- f. pelaksanaan ekstensifikasi;
- g. penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
- h. pelaksanaan pemeriksaan pajak;
- i. pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
- j. pelaksanaan konsultasi perpajakan;
- k. pelaksanaan intensifikasi;
- l. pembetulan ketetapan pajak;
- m. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- n. pelaksanaan administrasi kantor.

## **A. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkajenebermo berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (lihat bagan organisasi) adalah sebagai berikut:

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- b. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
- c. Seksi Pelayanan;
- d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
- e. Seksi Pengawasan I;
- f. Seksi Pengawasan II;
- g. Seksi Pengawasan III;
- h. Seksi Pengawasan IV;
- i. Seksi Pengawasan V;
- j. Seksi Pengawasan VI; dan
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.

## Bagan Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalanbun



- UNIT Eselon III
- UNIT Fungsional
- UNIT Eselon IV

Sedangkan unit kerja operasional atau kantor pelayanan yang berada di bawah koordinasi langsung Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalanbun adalah Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Nanga Bulik dan Sukamara.

## **D. Wewenang dan Tanggung Jawab**

Seiring dengan kemajuan di bidang teknologi dan informasi serta sistem keterbukaan dewasa ini menuntut dilakukan adanya perubahan-perubahan, utamanya perubahan dalam pola pikir (*mind set*) dan organisasi untuk menuju *good governance*. Begitu pula halnya dengan Direktorat Jenderal Pajak telah terjadi perubahan dalam struktur organisasinya. Pengembangan organisasi ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak yang pada gilirannya dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Dalam tahun pajak 2024 ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalanbun diberi wewenang dan tanggung jawab oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah untuk mengumpulkan penerimaan dari sektor pajak sebesar Rp 2.468.990.713.000 mengalami kenaikan sebesar Rp 228.068.161 dari target pajak tahun 2023 yaitu sebesar Rp 2.240.921.952.000 Disinilah perlunya peran serta dan dukungan dari seluruh pegawai yang berada dilingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalanbun untuk turut serta mendukung pencapaian target yang dibebankan tersebut.

## **E. Sistematika Pelaporan**

**Bab I : Pendahuluan**

**Bab II : Rencana Strategis dan Penetapan Perjanjian Kinerja 2024**

**Bab III : Akuntabilitas Kinerja**

**Bab IV : Penutup**

## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang tertuang dalam rencana strategis Direktorat Jenderal Pajak, yang disusun berdasarkan pada Rencana Strategis DJP.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalanbun memikul beban tanggung jawab serta peran yang sangat strategis, yaitu:

*"Mengamankan dan meningkatkan pendapatan negara dari pajak serta penerimaan negara bukan pajak sesuai peraturan perundangan yang berlaku sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri".*

Rencana strategis merupakan suatu proses untuk mewujudkan Laporan Kinerja (LAKIN) yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu lebih dari satu tahun (1-5 tahun).

Rencana strategis Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalanbun tidak terlepas dari visi, dan misi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu dengan tugas pokoknya mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak yang mampu menunjang pembiayaan pemerintah. Tahun pajak 2024 rencana kinerja untuk pencapaian target penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalanbun adalah sebesar 2,4 triliun rupiah.

## Visi

---

Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah:

“Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara”.

## Misi

---

Misi merupakan suatu pernyataan yang menggambarkan tujuan keberadaan, tugas, fungsi, peran dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dan peraturan serta kebijaksanaan pemerintah dengan dijiwai oleh prinsip-prinsip dan nilai-nilai strategi organisasi di dalam berbagai bidang dalam lingkungannya dimana Ditjen Pajak beraktifitas dan berinteraksi.

Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah:

“Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

1. mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
2. pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
3. aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional; dan
4. kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.”

## Tujuan

---

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan.

## Sasaran

---

Sasaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalanbun pada tahun anggaran 2024 adalah tercapainya target penerimaan negara yang optimal dari sektor pajak, serta terwujudnya tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi.

## B. Penetapan Kinerja Tahun 2024

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab kinerja. Dengan kata lain penetapan kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Penetapan kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu unit kerja dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja merupakan perwujudan dari perencanaan kinerja beserta indikator keberhasilannya. Perencanaan kinerja adalah merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Rencana kinerja yang dibuat pada awal tahun memuat kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program yang ditetapkan dan indikator keberhasilannya.

Rencana kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalanbun adalah merupakan target yang harus dilaksanakan dan menjadi ukuran kerja unit vertikal dibawahnya yang dipertanggungjawabkan dalam bentuk LAKIN. Penetapan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalanbun untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

## Tabel Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Tabel 1.1 Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target
(1)	(2)	(3)
Penerimaan Pajak Negara yang Optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%
	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00
Kepatuhan wajib pajak yang tinggi	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%
	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%
Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%
Edukasi dan pelayanan yang efektif	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%
	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	100,00%
Pengawasan pembayaran masa yang efektif	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%
Pengawasan kepatuhan material yang efektif	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%
	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%
	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%
Penegakan hukum yang efektif	Tingkat efektivitas pemeriksaan	100,00%
	Tingkat Efektivitas Penagihan	75,00%
	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%

Data dan Informasi yang berkualitas	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%
	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00
Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00
	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00
	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00
Penguatan pengelolaan keuangan yang akuntabel	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalanbun adalah bentuk perwujudan dari seluruh rangkaian kegiatan yang dipertanggungjawabkan, baik keberhasilan maupun kegagalan dalam upaya menjalankan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang berhasil dicapai KPP Pratama Pangkalanbun Tahun 2024 sebesar 108,70%. NKO ini terdiri atas empat sasaran strategis: *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective* dan *Learning & Growth Perspective*.

#### 1. Perbandingan target awal tahun, target addendum dan realisasi kinerja tahun 2024

Pengukuran atau evaluasi tingkat capaian kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalanbun tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Tingkat capaian Kinerja tersebut selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024**

*Tabel 1. 2 Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024*

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Target Addendum	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penerimaan Pajak Negara yang Optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%		100.13%
	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	100,00	101.26
Kepatuhan wajib pajak yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%		100.11%
	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	100,00%	101.39%
Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100.00%	100,00%	100.25%

Edukasi dan pelayanan yang efektif	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	74,00%	120.00%
	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	100,00%	110.45
Pengawasan pembayaran masa yang efektif	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	90,00%	120.00%
Pengawasan kepatuhan material yang efektif	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	100,00%	120.00%
	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	100,00%	120.00%
	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	100,00%	118,14%
Penegakan hukum yang efektif	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	100,00%	120.00%
	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	75,00%	120.00%
	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	100.00%
Data dan Informasi yang berkualitas	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	100,00%	120.00%
	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	55,00%	120.00%
Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	100,00	117,50
	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	85,00	109.09
	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	90,00	111.11
Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	100,00	120

Dari Tabel Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 di atas, diketahui seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) terlat tercapai diatas target yang telah ditetapkan.

- Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya  
Berikut adalah realisasi kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya.

Tabel 1. 3 Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dibandingkan Dengan Dua Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penerimaan Pajak Negara yang Optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak	116.97	102.61	100.13
	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	103.84	111.42	101.26
Kepatuhan wajib pajak yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	119.81	100.25	100.11
	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	101.69	94.25	101.39
Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	103.33	122.70	100.25
Edukasi dan pelayanan yang efektif	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	79.83	84.00	88.80
	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	89.26	82.59	110.45
Pengawasan pembayaran masa yang efektif	Persentase pengawasan pembayaran masa	104.72	111.41	120.00
Pengawasan kepatuhan material yang efektif	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	120.00	120.00	120.00
	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	120.00	120.00
	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	118.14
Penegakan hukum yang efektif	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	-	-	119.47
	Tingkat efektivitas penagihan	118.34	103.22	119.86
	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	100.00
Data dan Informasi yang berkualitas	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	111.34	147.08	120.00

	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	65.00	69.92
Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebhintalan SDM	-	-	117.50
	Indeks Penilaian Integritas Unit	94.42	95.07	92.73
	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	99.99	100.00	100.00
Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	92.95	96.55	120.00

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi, DJP menetapkan dua belas sasaran strategis untuk mencapai destination statement DJP 2020-2024. Target kinerja ini dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024. Berikut adalah realisasi kinerja tahun 2024 disandingkan dengan target jangka menengah DJP.

Tabel 1. 4 Realisasi Kinerja Tahun 2024 Disandingkan Dengan Target Jangka Menengah DJP

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Berdasarkan Renstra	Realisasi 2024
		2024	(5)
(1)	(2)	(8)	(5)
Penerimaan Pajak Negara yang Optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100.13%
	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	101.26
Kepatuhan wajib pajak yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100.11%
	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	101.39%
Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100.25%
Edukasi dan pelayanan yang efektif	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	120.00%

	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	100,00%	110.45
Pengawasan pembayaran yang efektif	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	120.00%
Pengawasan kepatuhan yang efektif	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120.00%
	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120.00%
	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tetap waktu	100,00%	118.14%
Penegakan yang efektif	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120.00%
	Tingkat Efektivitas Penagihan	75,00%	120.00%
	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100.00%
Data dan Informasi yang berkualitas	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120.00%
	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00	120.00%
Organisasi yang berkinerja tinggi	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117.50
	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	109.09
	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	111.11
Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Keuangan dalam mendukung agenda pembangunan nasional (Nawa Cita). Renstra dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024. Berikut adalah realisasi kinerja tahun 2024 disandingkan dengan Renstra Kementerian Keuangan tahun 2020-2024.

Tabel 1. 5 Realisasi Kinerja Tahun 2024 Disandingkan Dengan Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024

Kode	Program/Sasaran Program (outcome)/Indikator/Kegiatan/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Target					Realisasi 2024
		2020	2021	2022	2023	2024	
015.04.12	Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak						
	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100%	100%	100%	100%	100.61%
	Persentase tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak	70%	70%	70%	70%	70%	100.65%
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	100.45 (skala 100)

4. Upaya-upaya dalam rangka pencapaian target kinerja

Untuk mencapai target kinerja yang diberikan, KPP Pratama Pangkalanbun melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

a. Untuk Wajib Pajak Strategis

- i. Pengawasan *Voluntary Payment*
- ii. Imbauan Pemenuhan Kewajiban Pajak Rutin dan Penerbitan SP2DK Tahun Berjalan
- iii. Penerbitan STP
- iv. Monitoring Tindak Lanjut SP2DK
- v. Konseling Wajib Pajak
- vi. Usulan Pemeriksaan

b. Untuk Wajib Pajak Kewilayahan

- i. Pengawasan *Voluntary Payment*
- ii. Monitoring Tindak Lanjut SP2DK (FP diterbitkan tapi belum setor dan tindak lanjut data TA)
- iii. Konseling Wajib Pajak
- iv. Intensifikasi dan tindak lanjut keputusan pengurangan PBB
- v. Pengawasan Bendahara Pemerintah baik Instansi Vertikal maupun Pemerintah Daerah

c. Upaya terkait Pemeriksaan

- i. Prioritas penyelesaian berkas pemeriksaan dengan potensi SKP yang akan cair sebelum 31 Desember 2024
- ii. Memantau komitmen Wajib Pajak yang telah berkomitmen membayar SKP sampai dengan akhir tahun.

d. Upaya terkait Penagihan.

- i. Melaksanakan lelang aset Wajib Pajak
- ii. Melakukan pemindahbukuan atas rekening Wajib Pajak yang telah di blokir
- iii. Mempercepat penerbitan Surat Teguran
- iv. Mengawasi pembayaran piutang pajak bagi Wajib Pajak yang telah menyerahkan surat komitmen
- v. Konseling Wajib Pajak

5. Analisis penyebab peningkatan/penurunan kinerja

Pada tahun 2024 realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Pangkalanbun sebesar Rp 2.472.285.176.968 atau 100.13% dari rencana yang telah ditetapkan Rp 2.468.990.713.000. Kinerja penerimaan pajak yang sangat baik tak lepas dari tren peningkatan harga komoditas serta membaiknya perekonomian domestik dan global. Selain itu, kinerja penerimaan pajak juga dipengaruhi oleh penurunan restitusi, serta kenaikan tarif PPN. Hal ini karena kerja keras dan kerja cerdas yang dilakukan, diantaranya:

- a. Melakukan monitoring dan imbauan dalam rangka menjaga voluntary payment, penerbitan surat himbauan pemenuhan kewajiban rutin yang belum dilaksanakan Wajib Pajak serta penerbitan STP;
- b. Penerbitan SP2DK berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari pihak ketiga, berdasarkan analisis mandiri serta analisis komprehensif terhadap kewajiban perpajakan tahun-tahun sebelumnya;
- c. Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L) dilaksanakan secara optimal;
- d. Pemeriksaan dilakukan dengan cermat dengan prioritas Wajib Pajak yang memiliki kemampuan ekonomi untuk melakukan pelunasan hasil ketetapan atau dalam rangka menekan pengeluaran restitusi yang menggerogoti penerimaan secara keseluruhan;
- e. Kegiatan penagihan aktif dan konseling dilaksanakan secara konsisten dalam rangka mendorong effort untuk penerimaan negara yang lebih tinggi dari tunggakan pajak.

IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dan Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran tidak mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan penambahan jumlah wajib pajak lapor SPT, wajib pajak yang berada di wilayah tertentu diperlukan treatment khusus karena kondisi geografis dan kendala jaringan komunikasi. Ini berpengaruh terhadap realisasi penyampaian SPT Tahunan orang pribadi maupun badan. Sedangkan pada indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran disebabkan oleh realisasi belanja yang tidak sesuai dengan rencana penarikan dana bulanan meskipun sudah dilakukan kegiatan pengoptimalan belanja sesuai dengan rencana penarikan dana yang sudah direncanakan. Di samping itu, kesadaran Wajib Pajak masih kurang.

Untuk itu, maka strategi pemecahan masalah untuk tahun yang akan datang adalah dengan aksi sebagai berikut:

- a. Melakukan analisis komprehensif/menyeluruh untuk wajib pajak sektor perkebunan kelapa sawit dan turunannya, sektor pertambangan, sektor perdagangan, sektor kesehatan dan sektor lainnya
- b. Melakukan pemeriksaan atas WP yang mengajukan restitusi berdasarkan kompensasi tahun sebelumnya
- c. Menyampaikan surat tagihan pajak
- d. Menyelenggarakan iht terkait communication skill dan negotiation skill
- e. Menyelenggarakan in house training bagi AR dan FPP terkait transfer pricing, tax planning, dan/atau tema tax avoidance lainnya
- f. Melaksanakan IHT Penggalan potensi sektor berbasis sektoral di luar sektor perkebunan buah kelapa sawit (distributor, walet, telekomunikasi, kesehatan, dll)
- g. Pembahasan bersama Kepala Kantor, Kepala Seksi Terkait, dan account representative terkait SPT Lebih bayar Badan dengan nilai lebih dari Rp. 1.000.0000.000
- h. Membentuk Satuan Tugas Penerimaan & Pengolahan Penyampaian SPT Tahunan
- i. Kerjasama dengan asosiasi, komunitas, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya terkait peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Nonkaryawan
- j. Memberikan edukasi, sosialisasi, pelatihan, serta penyuluhan mengenai pengisian SPT Tahunan kepada Wajib Pajak melalui kelas pajak dengan berbagai channel komunikasi/ media massa/media sosial (baik melalui conference (zoom meeting) atau secara tatap muka) ataupun recorded (youtube channel atau lainnya)
- k. Melaksanakan pelayanan dalam bentuk pojok pajak atau pos pelayanan pajak (Layanan Diluar kantor) pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat
- l. Himbauan kepada pemerintah daerah agar mempersyaratkan Bukti Penyampaian SPT Tahunan dalam persyaratan administrasi kepegawaian
- m. Membuat video himbauan dan testimoni lapor spt tahunan oleh kepala daerah
- n. Melaksanakan kegiatan bedah profil wajib pajak untuk saling bertukar informasi teknik penggalan
- o. Menyelenggarakan sharing session/IHT/bimtek untuk menjaga kualitas SDM yang terlibat dalam penyuluhan perpajakan
- p. Mengoptimalkan kerjasama dengan Tax Center, penggiat UMKM, asosiasi, komunitas, instansi pemerintah pusat/daerah, dan stakeholder lainnya

- q. Melakukan prioritas penyuluhan kepada WP penunjang penerimaan yaitu pengepul sawit, jasa angkutan sektor penunjang perusahaan pengolahan kelapa sawit dan koperasi
- r. Inovasi kegiatan edukasi melalui media sosial berupa live instagram, radio talkshow, dan memperbanyak saluran edukasi melalui WA grup edukasi
- s. Melakukan konseling terhadap WP secara offline maupun online
- t. Melakukan tindak lanjut atas SP2DK dengan visit
- u. Menyelenggarakan sharing session/IHT mengenai penggalan potensi pajak bagi Account Representative dan Kepala Seksi Pengawasan yang disampaikan oleh narasumber yang memiliki kompetensi yang mumpuni di bidangnya
- v. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemeriksaan
- w. Menyelenggarakan rapat pembahasan DSP4 dan DSPP untuk menghasilkan usulan pemeriksaan WP yang berkualitas dan mempunyai kemampuan bayar yang cukup
- x. Mengadakan Forum Group Discussion antara Fungsional dan AR untuk membahas usulan pemeriksaan khusus dan wajib pajak group agar pemeriksaan pajak lebih optimal
- y. Internalisasi kode etik dan nilai-nilai kementerian keuangan
- z. internalisasi anti korupsi
- aa. Membuat rencana pengeluaran berbasis kinerja
- bb. Melakukan monitoring dan evaluasi efektifitas penyerapan anggaran secara triwulanan

IKU Persentase tingkat kepatuhan formal WP Badan dan OP Non Karyawan pada tahun 2024 mencapai 101,39%. Target angka mutlak Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh sebesar 37.324. Permasalahan dan kendala tidak tercapainya target IKU ini adalah luasnya wilayah kerja KPP Pratama Pangkalanbun dan ketersediaan akses yang memadai ke KPP Pratama Pangkalanbun.

Strategi pemecahan masalah untuk tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Membentuk Satuan Tugas Penerimaan & Percepatan Penyampaian SPT Tahunan berbasis segmentasi Wajib Pajak;
- b. Kerjasama dengan asosiasi, komunitas, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya terkait peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Nonkaryawan;
- c. Memberikan edukasi, sosialisasi, pelatihan, serta penyuluhan mengenai pengisian SPT Tahunan kepada Wajib Pajak melalui kelas pajak dengan berbagai channel komunikasi/ media massa/media sosial (baik melalui conference (zoom

meeting) atau secara tatap muka) ataupun recorded (youtube channel atau lainnya);

- d. Melaksanakan pemilihan Desa Teladan Pajak;
- e. Melaksanakan pelayanan dalam bentuk pojok pajak atau pos pelayanan pajak (Layanan Diluar kantor) pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat;
- f. Himbauan kepada pemerintah daerah agar mempersyaratkan Bukti Penyampaian SPT Tahunan dalam persyaratan administrasi kepegawaian;
- g. Melakukan penelitian formal dan material atas SPT lebih bayar sebelum diteruskan ke seksi P3

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 sebesar 120.00. Pencapaian ini masih telah mencapai target yang ditetapkan, yakni 100.

Strategi yang perlu dilakukan dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut:

- i. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan;
- ii. Melakukan reuiu pengelolaan anggaran
- iii. Mengoptimalkan kinerja pencapaian kinerja kepatuhan formal Wajib Pajak dengan anggaran yang tersedia.

#### 6. Analisis dan efisiensi penggunaan sumber daya

Berikut disampaikan analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya untuk Tahun Anggaran 2024 pada tabel berikut:

Tabel 1. 6 Efisiensi Penggunaan Sumber daya untuk Tahun Anggaran 2024

#### INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode SA	Kode Satker	Urutan Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	102	015	663544	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PANGKALAN BUN	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	80.00	80%	0.00	100.00
					Bobot	30	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00			100.00			100.00				

Berdasarkan table tersebut di atas, Seluruh kompoen penilaian yakni berupa revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian taguhan, pengelolaan UP dan TUP serta capaian output yang diperoleh KPP Pratama Pangkalanbun mencapai target tang telah ditetapkan.

Berdasarkan jenis belanja, dapat dilihat perbandingan PAGU dengan realisasi penyerapan anggaran sebagai berikut:

Tabel 1. 7 PAGU dibandingkan dengan Realisasi Penyerapan Anggaran

Uraian	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Total
<b>PAGU</b>	Rp. 926.139.000	Rp. 6.117.577.000	Rp. 0.00	Rp. 7.043.716.00
<b>Realisasi</b>	Rp. 926.071.000	Rp. 6.086.817.259	Rp. 0.00	Rp. 7.012.888.259
<b>Persentase</b>	99.99%	99.49%	-%	99.56%
<b>Sisa</b>	Rp. 30.827.741	Rp. 68.000	Rp. 0.00	Rp. 30.827.741

Tabel ini menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran pada Belanja Pegawai sebesar 99.99%, pada Belanja Barang sebesar 99.49%, dan pada tahun 2024 tidak ada belanja Modal serta total tingkat penyerapan anggaran selama tahun 2024 sebesar 99.56%.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Nilai Kinerja Organisasi yang dicapai pada tahun 2024 adalah 108,70%. Seluruh IKU telah tercapai di atas 100% dan memenuhi target. KPP Pratama Pangkalanbun telah melakukan beberapa program/kegiatan untuk mencapai NKO tersebut. Berikut ini kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian IKU di atas target:
  - a. Monitoring dan imbauan dalam rangka menjaga voluntary payment, serta penerbitan STP;
  - b. Penerbitan SP2DK dengan analisis komprehensif atas kewajiban perpajakan tahun sebelumnya;
  - c. Menghubungi WP secara intens untuk mengkomunikasikan SP2DK
  - d. Pemeriksaan dilakukan dengan cermat dengan prioritas WP yang mempunyai kemampuan ekonomi untuk melakukan pelunasan hasil ketetapan, dibarengi dengan kegiatan penagihan aktif dan konseling dilaksanakan secara konsisten;
  - e. Penyuluhan jemput bola dengan mendatangi desa/kecamatan, penyuluhan one to one dengan telpon, sms/wa;
  - f. Melaksanakan IHT untuk peningkatan kompetensi pegawai;
  - g. Melakukan pengumpulan data pihak ketiga dan terus berkoordinasi dan menjaga hubungan baik dengan Instansi Pemerintah;

h. Lakukan pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi.

8. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Tahun 2024, KPP Pratama Pangkalanbun telah menyusun mitigasi risiko dalam pencapaian Sasaran Organisasi serta menentukan rencana aksi untuk mengelola risiko pada tingkat yang dapat diterima, sehingga memberikan keyakinan yang memadai dalam mencapai tujuan organisasi.

Tabel 1. 8 Mitigasi Risiko Tahun 2024

Opsi Mitigasi Risiko	Rencana Aksi Mitigasi Risiko	Output	Target
mengurangi kemungkinan dan dampak	1. Melakukan analisis komprehensif/menyeluruh untuk wajib pajak sektor perkebunan kelapa sawit dan turunannya, sektor pertambangan, sektor perdagangan, sektor kesehatan dan sektor lainnya	SP2DK	565
	2. Melakukan pemeriksaan atas WP yang mengajukan restitusi berdasarkan kompensasi tahun sebelumnya	SP2	8
	3. Menyampaikan surat tagihan pajak	Laporan	12
mengurangi kemungkinan dan dampak	1. Menyelenggarakan iht terkait comunication skill dan negotiation skill	UND	1
	2. Menyelenggarakan in house training bagi AR dan FPP terkait transfer pricing, tax planning, dan/atau tema tax avoidance lainnya	UND	2

	3. Melaksanakan IHT Penggalan potensi sektor berbasis sektoral di luar sektor perkebunan buah kelapa sawit (distributor, walet, telekomunikasi, kesehatan, dll)	Kegiatan	1
	4. Pembahasan bersama Kepala Kantor, Kepala Seksi Terkait, dan account representative terkait SPT Lebih bayar Badan dengan nilai lebih dari Rp. 1.000.0000.000	UND	1
mengurangi kemungkinan dan dampak	1. Membentuk Satuan Tugas Penerimaan & Pengolahan Penyampaian SPT Tahunan	KEP	1
	2. Kerjasama dengan asosiasi, komunitas, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya terkait peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Nonkaryawan	Surat	9
	3. Memberikan edukasi, sosialisasi, pelatihan, serta penyuluhan mengenai pengisian SPT Tahunan kepada Wajib Pajak melalui kelas pajak dengan berbagai channel komunikasi/ media massa/media sosial (baik melalui conference (zoom meeting) atau secara tatap muka) ataupun recorded (youtube channel atau lainnya)	Kegiatan	18
	4. Melaksanakan pelayanan dalam bentuk pojok pajak atau pos pelayanan pajak (Layanan Diluar kantor) pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat	Kegiatan	30
	5. Himbauan kepada pemerintah daerah agar mempersyaratkan Bukti Penyampaian SPT Tahunan dalam persyaratan administrasi kepegawaian	Kegiatan	3

	6. Membuat video himbauan dan testimoni lapor spt tahunan oleh kepala daerah	Video	3
mengurangi kemungkinan dan dampak	1. Melaksanakan kegiatan bedah profil wajib pajak untuk saling bertukar informasi teknik penggalan	Wajib Pajak	20
mengurangi kemungkinan dan dampak	1. Menyelenggarakan sharing session/IHT/bimtek untuk menjaga kualitas SDM yang terlibat dalam penyuluhan perpajakan	Kegiatan	12
	2. Mengoptimalkan kerjasama dengan Tax Center, penggiat UMKM, asosiasi, komunitas, instansi pemerintah pusat/daerah, dan stakeholder lainnya	Kegiatan	5
	3. Melakukan prioritas penyuluhan kepada WP penunjang penerimaan yaitu pengepul sawit, jasa angkutan sektor penunjang perusahaan pengolahan kelapa sawit dan koperasi	Kegiatan	2
	4. Inovasi kegiatan edukasi melalui media sosial berupa live instagram, radio talkshow, dan memperbanyak saluran edukasi melalui WA grup edukasi	Kegiatan	12
mengurangi kemungkinan dan dampak	1. Melakukan konseling terhadap WP secara offline maupun online	Kegiatan	565
	2. Melakukan tindak lanjut atas SP2DK dengan visit	Wajib Pajak	648

mengurangi kemungkinan dan dampak	1. Menyelenggarakan sharing session/IHT mengenai penggalan potensi pajak bagi Account Representative dan Kepala Seksi Pengawasan yang disampaikan oleh narasumber yang memiliki kompetensi yang mumpuni di bidangnya	UND	2
mengurangi kemungkinan dan dampak	1. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemeriksaan	UND	4
mengurangi kemungkinan dan dampak	1. Menyelenggarakan rapat pembahasan DSP4 dan DSPP untuk menghasilkan usulan pemeriksaan WP yang berkualitas dan mempunyai kemampuan bayar yang cukup	UND	12
	2. Mengadakan Forum Group Discussion antara Fungsional dan AR untuk membahas usulan pemeriksaan khusus dan wajib pajak group agar pemeriksaan pajak lebih optimal	LHR	2
mengurangi dampak	1. Internalisasi kode etik dan nilai-nilai kementerian keuangan	UND	12
mengurangi dampak	1. internalisasi anti korupsi	UND	1
mengurangi kemungkinan dan dampak	1. Membuat rencana pengeluaran berbasis kinerja	RPD	1
	2. Melakukan monitoring dan evaluasi efektifitas penyerapan anggaran secara triwulanan	UND	4

Analisis atas pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko yang telah disusun tahun 2024 ada di lampiran 2.

## 9. Rencana aksi di tahun 2025

Berikut adalah rencana aksi yang akan dilakukan di tahun 2025:

Tabel 1. 9 Rencana Aksi Mitigasi Resiko Tahun 2025

No	Kejadian Risiko	Rencana Aksi Mitigasi Risiko	Output	Target
1	Penerimaan bruto mengalami pertumbuhan yang negatif	1. Melakukan analisis komprehensif/menyeluruh untuk wajib pajak sektor perkebunan kelapa sawit dan turunannya, sektor pertambangan, sektor perdagangan, sektor kesehatan dan sektor lainnya	SP2DK	936
		2. Melakukan Pemeriksaan Wajib Pajak Rugi Tidak Lebih Bayar (RTLBB), WP Kompensasi, Post Audit WP pengembalian pendahuluan dengan nilai material	SP2	4
2	Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak mencapai target	1. Menyelenggarakan in house training bagi AR dan FPP terkait transfer pricing, tax planning, sektor pendukung industri kelapa sawit dan/atau tema tax avoidance lainnya	UND	2
		2. Pembahasan bersama Kepala Kantor, Kepala Seksi Terkait, dan account representative terkait SPT Lebih bayar Badan dengan nilai lebih dari Rp. 1.000.0000.000	UND	2
3	Target tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak tercapai	1. Membentuk Satuan Tugas Penerimaan & Pengolahan Penyampaian SPT Tahunan	KEP	1
		2. Kerjasama dengan asosiasi, komunitas, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya terkait peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Surat	9
		3. Memberikan edukasi, sosialisasi, pelatihan, serta penyuluhan mengenai pengisian SPT Tahunan dan coretax kepada Wajib Pajak melalui kelas pajak dengan berbagai channel komunikasi/ media massa/media sosial (baik melalui conference (zoom meeting) atau secara tatap muka) ataupun recorded (youtube channel atau lainnya)	Kegiatan	18
		4. Melaksanakan pelayanan dalam bentuk pojok pajak atau pos pelayanan pajak (Layanan Diluar kantor) pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat	Kegiatan	20
		5. Himbauan kepada pemerintah daerah agar mempersyaratkan Bukti Penyampaian SPT Tahunan dalam persyaratan administrasi kepegawaian	Kegiatan	3
		6. Membuat video himbauan dan testimoni lapor spt tahunan oleh kepala daerah	Video	3
4	Penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material	1. Melaksanakan kegiatan bedah profil wajib pajak untuk saling bertukar informasi teknik penggalan potensi pajak	UND	12

	(PKM) terhadap penerimaan tidak mencapai target			
5	Kegiatan edukasi yang dilakukan tidak menunjang tercapainya tingkat kepatuhan Wajib Pajak	1. Menyelenggarakan sharing session/IHT/bimtek untuk menjaga kualitas SDM yang terlibat dalam penyuluhan perpajakan	Kegiatan	4
		2. Mengoptimalkan kerjasama dengan Tax Center, penggiat UMKM, asosiasi, komunitas, instansi pemerintah pusat/daerah, dan stakeholder lainnya	Kegiatan	4
		3. Melakukan prioritas penyuluhan kepada WP penunjang penerimaan yaitu pengepul sawit, jasa angkutan sektor penunjang perusahaan pengolahan kelapa sawit dan koperasi	Kegiatan	2
		4. Inovasi kegiatan edukasi melalui media sosial berupa live instagram, radio talkshow, dan memperbanyak saluran edukasi melalui WA grup edukasi	Kegiatan	12
6	Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP yang dilakukan oleh AR tidak memenuhi target yang ditetapkan	1. Melakukan konseling terhadap WP	BA	565
		2. Melakukan tindak lanjut atas SP2DK dengan visit	Wajib Pajak	648
7	Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang tidak tepat waktu	1. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemeriksaan	UND	4
8	Realisasi nilai ketetapan dibayar dari kegiatan pemeriksaan tidak mencapai target	1. Menyelenggarakan rapat pembahasan DSP4 dan DSPP untuk menghasilkan usulan pemeriksaan WP yang berkualitas dan mempunyai kemampuan bayar yang cukup	UND	12
		2. Mengadakan Forum Group Discussion antara Fungsional dan AR untuk membahas usulan pemeriksaan khusus dan wajib pajak group agar pemeriksaan pajak lebih optimal	LHR	2
9	Loyalitas pegawai yang rendah terhadap organisasi	1. Internalisasi kode etik dan nilai-nilai kementerian keuangan	UND	12

10	Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum	1. internalisasi anti korupsi	UND	1
11	Pelaksanaan anggaran tidak sesuai dengan perencanaan anggaran	1. Membuat rencana pengeluaran berbasis kinerja	RPD	1
		2. Melakukan monitoring dan evaluasi efektifitas penyerapan anggaran secara triwulanan	UND	4

Tahun 2024 telah dilakukan mitigasi risiko, dari Sembilan sasaran organisasi terdapat dua puluh kejadian risiko yang dapat diidentifikasi. Setelah mempertimbangkan besaran risiko dan prioritas risiko diputuskan untuk melakukan mitigasi terhadap sebelas kejadian dengan rencana aksi sebagaimana tertuang dalam tabel di atas.

## B. Realisasi Anggaran

Penyelenggaraan kegiatan KPP Pratama Pangkalanbun dibiayai oleh DIPA yang digunakan untuk kegiatan operasional kantor. DIPA KPP Pratama Pangkalanbun Tahun Anggaran 2024 untuk seluruh kegiatan adalah sebesar Rp. 7.046.716.00. Penyerapan anggaran 2024 berupa realisasi penggunaan untuk kegiatan operasional kantor adalah sebesar **Rp 7.012.888.259** atau **99.56%** dari alokasi anggaran yang tersedia. Dengan demikian realisasi penyerapan anggaran DIPA TA 2024 di bawah PAGU, dengan rincian sebagaimana tercantum pada **Lampiran I**.

## C. Penghargaan

Pada tahun 2024 KPP Pratama Pangkalanbun telah banyak menerima penghargaan dari berbagai pihak yakni Penetapan Satuan Kerja Peraih Nilai Sempurna IKPA Semester I Tahun Anggaran 2024 oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah, Tim penyusun laporan keuangan Direktorat Jenderal Pajak TA 2023 dengan capaian tertinggi wajar tanpa pengecualian oleh Direktur Jenderal Pajak.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalanbun merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran 2024, dan disusun sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja serta Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-4/PJ/2024 tanggal 5 Januari 2024 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2023 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Sasaran atau target yang dibebankan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalanbun tidak lepas dari misi Direktorat Jenderal Pajak yaitu menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan Undang-Undang Perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat.

Dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan kiranya perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan analisis komprehensif/menyeluruh untuk wajib pajak sektor perkebunan kelapa sawit dan turunannya, sektor pertambangan, sektor perdagangan, sektor kesehatan dan sektor lainnya
2. Melakukan pemeriksaan atas WP yang mengajukan restitusi berdasarkan kompensasi tahun sebelumnya
3. Menyampaikan surat tagihan pajak
4. Menyelenggarakan iht terkait *comunication skill* dan *negotiation skill*
5. Menyelenggarakan *in house training* bagi AR dan FPP terkait *transfer pricing*, *tax planning*, dan/atau tema *tax avoidance* lainnya
6. Melaksanakan IHT Penggalan potensi sektor berbasis sektoral di luar sektor perkebunan buah kelapa sawit (*distributor*, *walet*, *telekomunikasi*, *kesehatan*, dll)
7. Pembahasan bersama Kepala Kantor, Kepala Seksi Terkait, dan *account representative* terkait SPT Lebih bayar Badan dengan nilai lebih dari Rp. 1.000.0000.000
8. Membentuk Satuan Tugas Penerimaan & Pengolahan Penyampaian SPT Tahunan
9. Kerjasama dengan asosiasi, komunitas, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya terkait peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Nonkaryawan

10. Memberikan edukasi, sosialisasi, pelatihan, serta penyuluhan mengenai pengisian SPT Tahunan kepada Wajib Pajak melalui kelas pajak dengan berbagai channel komunikasi/ media massa/media sosial (baik melalui conference (zoom meeting) atau secara tatap muka) ataupun recorded (youtube channel atau lainnya)
11. Melaksanakan pelayanan dalam bentuk pojok pajak atau pos pelayanan pajak (Layanan Diluar kantor) pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat
12. Himbauan kepada pemerintah daerah agar mempersyaratkan Bukti Penyampaian SPT Tahunan dalam persyaratan administrasi kepegawaian
13. Membuat video himbauan dan testimoni lapor spt tahunan oleh kepala daerah
14. Melaksanakan kegiatan bedah profil wajib pajak untuk saling bertukar informasi teknik penggalian
15. Menyelenggarakan sharing session/IHT/bimtek untuk menjaga kualitas SDM yang terlibat dalam penyuluhan perpajakan
16. Mengoptimalkan kerjasama dengan Tax Center, penggiat UMKM, asosiasi, komunitas, instansi pemerintah pusat/daerah, dan stakeholder lainnya
17. Melakukan prioritas penyuluhan kepada WP penunjang penerimaan yaitu pengepul sawit, jasa angkutan sektor penunjang perusahaan pengolahan kelapa sawit dan koperasi
18. Inovasi kegiatan edukasi melalui media sosial berupa live instagram, radio talkshow, dan memperbanyak saluran edukasi melalui WA grup edukasi
19. Melakukan konseling terhadap WP secara offline maupun online
20. Melakukan tindak lanjut atas SP2DK dengan visit
21. Menyelenggarakan sharing session/IHT mengenai penggalian potensi pajak bagi Account Representative dan Kepala Seksi Pengawasan yang disampaikan oleh narasumber yang memiliki kompetensi yang mumpuni di bidangnya
22. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemeriksaan
23. Menyelenggarakan rapat pembahasan DSP4 dan DSPP untuk menghasilkan usulan pemeriksaan WP yang berkualitas dan mempunyai kemampuan bayar yang cukup
24. Mengadakan Forum Group Discussion antara Fungsional dan AR untuk membahas usulan pemeriksaan khusus dan wajib pajak group agar pemeriksaan pajak lebih optimal
25. Internalisasi kode etik dan nilai-nilai kementerian keuangan
26. internalisasi anti korupsi
27. Membuat rencana pengeluaran berbasis kinerja
28. Melakukan monitoring dan evaluasi efektifitas penyerapan anggaran secara triwulanan

Dengan disusunnya Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada semua pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkajenebun serta dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode tahunan berikutnya.

# LAMPIRAN I

## LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

### KPP PRATAMA PANGKALANBUN TAHUN ANGGARAN 2024



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PANGKALAN BUN

#### INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uralan Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	102	015	663644	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PANGKALAN BUN	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	80.00	80%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				

# LAMPIRAN II

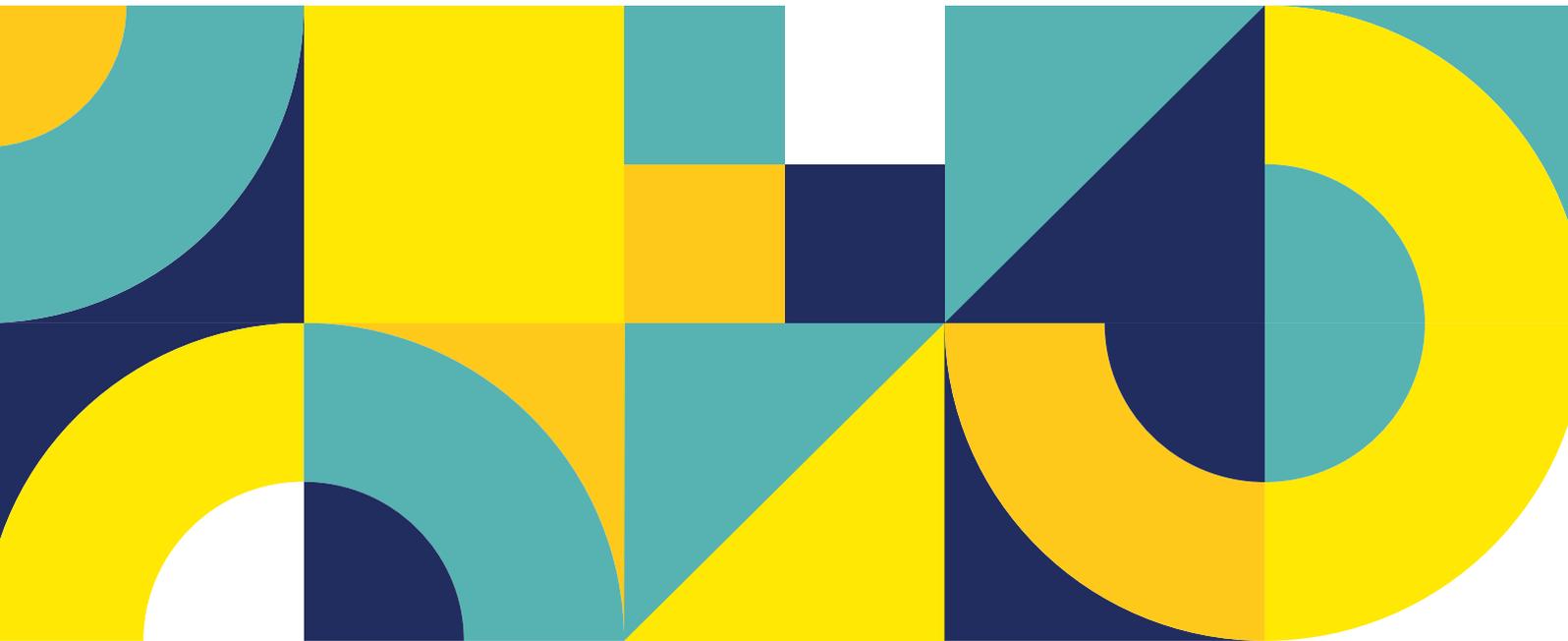
## FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi : KPP Pratama Pangkalanbun

Tahun Anggaran : 2024

NILAI KINERJA ORGANISASI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANWIL DJP KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH  
KPP PRATAMA PANGKALANBUN  
PERIODE PELAPORAN: S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	100,61
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							100,61
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,13%	Max	E/L	26%	57,78%	100,13
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	101,26	Max	P/L	19%	42,22%	101,26
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	100,45
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							100,65
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,11%	Max	E/L	26%	57,78%	100,11
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	101,39%	Max	P/L	19%	42,22%	101,39
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,25
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,25%	Max	E/M	21%	100,00%	100,25
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	117,43
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							115,23
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	110,45%	Max	E/M	21%	50,00%	110,45
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	120,00%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							119,38
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00
6c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	118,14%	Max	P/M	14%	33,33%	118,14
7	Penegakan hukum yang efektif							112,55
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	119,47%	Max	P/M	14%	26,92%	119,47
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	119,86%	Max	P/L	19%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	69,92%	Max	P/L	19%	57,58%	120,00
<i>Learning &amp; Growth Perspective</i>							25,00%	116,28
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							112,57
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,50	Max	P/M	14%	33,33%	117,50
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	92,73	Max	P/M	14%	33,33%	109,09
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	100,00	Max	P/M	14%	33,33%	111,11
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
<b>Nilai Kinerja Organisasi</b>								<b>108,79</b>



# KPP Pratama Pangkalanbun

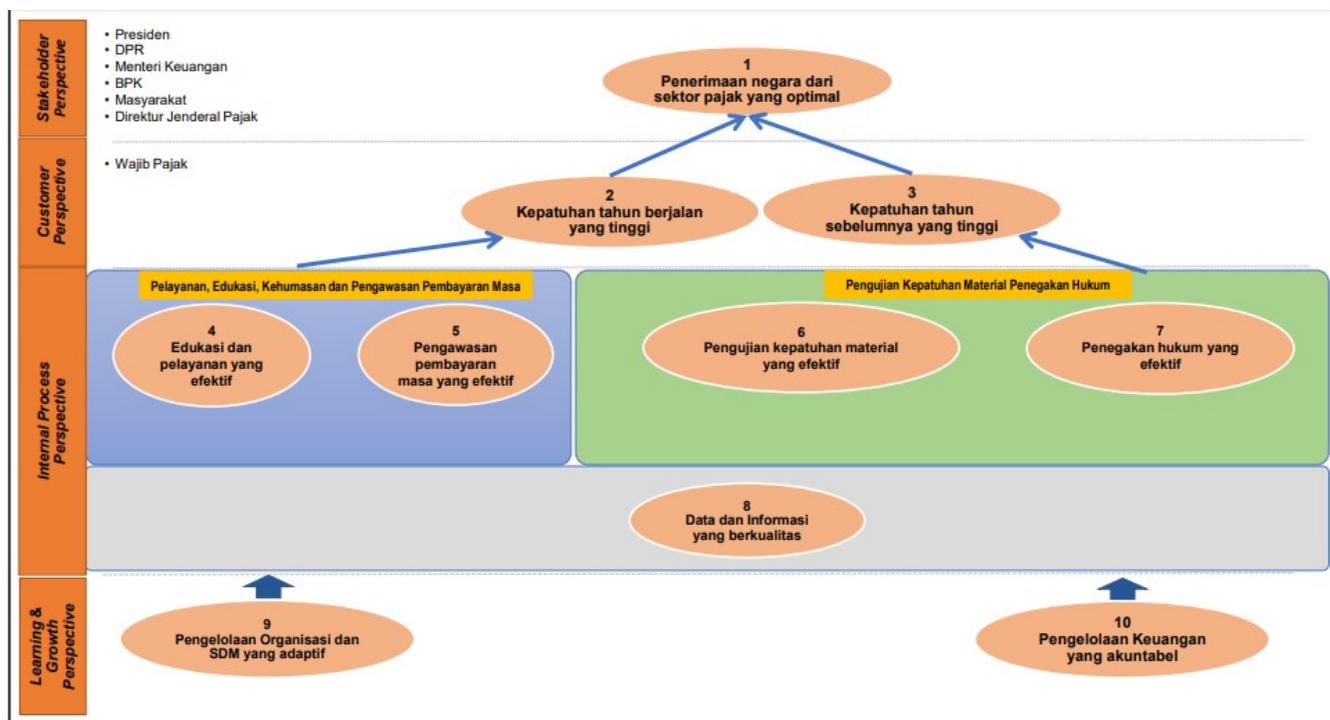
BERINTEGRITAS BERSIH MELAYANI



**PERJANJIAN KINERJA**  
**NOMOR: PK-9/WPJ.29/2024**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA**  
**PANGKALANBUN**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2024**

**Peta Strategi**

**Visi :**  
Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Pendapatan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



**PERJANJIAN KINERJA****TAHUN 2024****KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PANGKALANBUN  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti	100%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Permulaan	
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024	Anggaran
A.Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp 1.743.081.000
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp 1.045.385.000
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp 264.080.000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 433.616.000
B.Program Dukungan Manajemen	Rp 5.096.635.000
1.Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 4.170.496.000
2.Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 926.139.000
<b>Total</b>	<b>Rp 6.839.716.000</b>

Kepala Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan  
Selatan dan Tengah,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Syamsinar

Kotawaringin Barat, 31 Januari 2024  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama  
Pangkalanbun,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Teguh Setyobudi Suwondo



**RINCIAN TARGET KINERJA  
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PANGKALANBUN  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	27%	50%	50%	70%	70%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	27%	50%	50%	70%	70%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%



	masa							
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100



Kotawaringin Barat, 31 Januari 2024  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama  
Pangkalanbun,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Teguh Setyobudi Suwondo



**INISIATIF STRATEGIS**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PANGKALANBUN**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2024**

No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1.	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	Menyelenggarakan sharing session/IHT/bimtek untuk menjaga kualitas SDM yang terlibat dalam penyuluhan perpajakan	Kegiatan	Q1: 3 Q2: 3 Q3: 3 Q4: 3	Q1: Kegiatan Q2: Kegiatan Q3: Kegiatan Q4: Kegiatan	Januari-Desember	Seksi Pelayanan	-
		Mengoptimalkan kerjasama dengan Tax Center, penggiat UMKM, asosiasi, komunitas, instansi pemerintah pusat/daerah, dan stakeholder lainnya	Kegiatan	Q1: 1 Q2: 1 Q3: 1 Q4: 2	Q1: Kegiatan Q2: Kegiatan Q3: Kegiatan Q4: Kegiatan	Januari-Desember	Seksi Pelayanan	-
		Melakukan prioritas penyuluhan kepada WP penunjang penerimaan yaitu pengepul sawit, jasa angkutan sektor penunjang	Kegiatan	Q1: 0 Q2: 0 Q3: 1 Q4: 1	Q1: Kegiatan Q2: Kegiatan Q3: Kegiatan Q4: Kegiatan	Januari-Desember	Seksi Pelayanan	-



		perusaan pengolahan kelapa sawit dan koperasi						
		Inovasi kegiatan edukasi melalui media sosial berupa live instagram, radio talkshow, dan memperbanyak saluran edukasi melalui WA grup edukasi	Kegiatan	Q1: 3 Q2: 3 Q3: 3 Q4: 3	Q1: Kegiatan Q2: Kegiatan Q3: Kegiatan Q4: Kegiatan	Januari-Desember	Seksi Pelayanan	-
2.	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	Melakukan konseling terhadap WP secara offline maupun online	Kegiatan	Q1: 141 Q2: 141 Q3: 141 Q4: 142	Q1: Kegiatan Q2: Kegiatan Q3: Kegiatan Q4: Kegiatan	Januari-Desember	Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, VI	-
		Melakukan tindak lanjut atas SP2DK dengan visit	Kegiatan	Q1: 162 Q2: 162 Q3: 162 Q4: 162	Q1: Kegiatan Q2: Kegiatan Q3: Kegiatan Q4: Kegiatan	Januari-Desember	Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, VI	-
3.	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	"Menyelenggarakan sharing session/IHT mengenai penggalan potensi pajak bagi Account Representative dan Kepala Seksi Pengawasan yang disampaikan oleh narasumber yang memiliki kompetensi yang	UND	Q1: 0 Q2: 1 Q3: 0 Q4: 1	Q1: UND Q2: UND Q3: UND Q4: UND	Januari-Desember	Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, VI, Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	-



		mumpuni di bidangnya"						
4.	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemeriksaan	UND	Q1: 1 Q2: 1 Q3: 1 Q4: 1	Q1: UND Q2: UND Q3: UND Q4: UND	Januari-Desember	P3	-
		Menyelenggarakan rapat pembahasan DSP4 dan DSPP untuk menghasilkan usulan pemeriksaan WP yang berkualitas dan mempunyai kemampuan bayar yang cukup	UND	Q1: 3 Q2: 3 Q3: 3 Q4: 3	Q1: UND Q2: UND Q3: UND Q4: UND	Januari-Desember	P3, PKD	-
		Mengadakan Forum Group Discussion antara Fungsional dan AR untuk membahas usulan pemeriksaan khusus dan wajib pajak group agar pemeriksaan pajak lebih optimal	LHR	Q1: 0 Q2: 1 Q3: 0 Q4: 1	Q1: LHR Q2: LHR Q3: LHR Q4: LHR	Januari-Desember	Kepala Seksi Pengawasan I	-
5.	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan	Internalisasi kode etik dan nilai-nilai kementerian keuangan	UND	Q1: 3 Q2: 3 Q3: 3 Q4: 3	Q1: UND Q2: UND Q3: UND Q4: UND	Januari-Desember	Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	-



	Kegiatan Kebintalan SDM	Internalisasi anti korupsi	UND	Q1: 1 Q2: 0 Q3: 0 Q4: 0	Q1: UND Q2: UND Q3: UND Q4: UND	Januari-Desember	Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	-
6.	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	Membuat rencana pengeluaran berbasis kinerja	RPD	Q1: 1 Q2: 0 Q3: 0 Q4: 0	Q1: RPD Q2: RPD Q3: RPD Q4: RPD	Januari-Desember	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	-
		Melakukan monitoring dan evaluasi efektifitas penyerapan anggaran secara triwulanan	UND	Q1: 1 Q2: 1 Q3: 1 Q4: 1	Q1: UND Q2: UND Q3: UND Q4: UND	Januari-Desember	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	-

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama  
Pangkalanbun,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Teguh Setyobudi Suwondo



SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Teguh Setyobudi Suwondo	NAMA	Syamsinar
NIP	197001161991031003	NIP	197004141995032001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tk.I/IVb	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda/IVc
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalanbun	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalanbun	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. UTAMA</b>				
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	Penerima Layanan
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	Penerima Layanan
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	Penerima Layanan



	Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah)	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	Penerima Layanan
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
4.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif ( Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	Proses Bisnis
		Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	Proses Bisnis
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif ( Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah)	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	Proses Bisnis
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif ( Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah)	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	Proses Bisnis
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	Proses Bisnis



	Tengah)	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	Proses Bisnis
7.	Penegakan hukum yang efektif ( Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah)	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	Proses Bisnis
		Tingkat Efektivitas Penagihan	75%	Proses Bisnis
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	Proses Bisnis
8.	Data dan informasi yang berkualitas ( Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah)	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	Proses Bisnis
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	Proses Bisnis
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah)	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran
10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran



Wilayah Direktorat Jenderal  
Pajak Kalimantan Selatan dan  
Tengah)

## B. TAMBAHAN

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li><li>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li><li>- Melakukan perbaikan tiada henti</li></ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li><li>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</li><li>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li></ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li><li>- Membantu orang lain belajar</li></ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas</p>



PERILAKU KERJA		
	- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:  Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan:  Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:  Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.



PERILAKU KERJA		
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> <li>-Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> <li>-Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

Pegawai yang Dinilai,

Kotawaringin Barat, 31 Januari 2024  
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Teguh Setyobudi Suwondo  
197001161991031003



Ditandatangani secara elektronik

Syamsinar  
197004141995032001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	96 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1	<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	27%	50%	50%	70%	70%	100%	100%
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	27%	50%	50%	70%	70%	100%	100%
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%



7	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
8	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Tingkat Efektivitas Penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
14	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
15	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
16	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
17	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100



18	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
19	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
20	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
<b>KONSEKUENSI</b>								
1	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							
2	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Teguh Setyobudi Suwondo  
197001161991031003

Kotawaringin Barat, 31 Januari 2024  
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Syamsinar  
197004141995032001

